

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor perekonomian yang penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kekayaan alam dan budaya merupakan faktor penting dalam menarik pariwisata di Indonesia. Pariwisata merupakan sektor penting yang dapat membantu mengembangkan suatu daerah dan menghasilkan pendapatan daerah dan lapangan pekerjaan. Pengembangan potensi pariwisata memiliki dampak positif bagi perubahan kehidupan masyarakat. Pengembangan potensi pariwisata terbukti dapat memberikan imbas positif dengan adanya perubahan yang besar pada kehidupan masyarakat. Secara ekonomi pariwisata memberikan dampak dalam ekspansi lapangan bisnis dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan devisa negara.

Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, dibentuk berdasarkan undang-undang RI No. 33 Tahun 2007 yang berasal dari pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan luas wilayah sebesar 1.278,21 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 11 kecamatan dan 144 desa, serta termasuk 39 pulau. Kabupaten ini tergolong daerah yang strategis, terutama dilihat dari aspek potensi wisata yang dimilikinya, salah satunya seperti destinasi wisata pantai. Provinsi Lampung memiliki banyak obyek wisata pantai dan laut yang eksotis. Lokasi pantai yang umumnya terletak tidak terlalu jauh dari pusat kota Bandar Lampung. Salah satu lokasi pantai tujuan wisata yang cukup diminati di Kabupaten Pesawaran yaitu pantai Mutun. Secara administratif, pantai Mutun masuk dalam wilayah Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, tepatnya di desa Sukajaya Lempasing. Saat ini pantai Mutun menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Provinsi Lampung (Abdillah, 2016). Berdasarkan data jumlah pengunjung tempat wisata di Kabupaten Pesawaran tahun 2020-2022 yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, pantai Mutun merupakan pantai yang ramai di

kunjungi oleh wisatawan setelah pulau pahawang , karena potensi wisata pantai Mutunlah yang menjadi daya tarik dipantai ini,yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke pantai mutun. Pantainya yang bersih dengan pasirnya yang putih dan ombaknya yang tidak besar sehingga cocok untuk aktivitas *snorkling*. Di pantai Mutun tersedia berbagai fasilitas yang bisa di gunakan oleh wisatawan berupa pondokan, kamar mandi/kamar ganti, toilet, mushola dan terdapat juga wahana perahu, kano, *banana boat*, dan arena *outbound*. Wisata pantai Mutun menyediakan penyewaan ban pelampung untuk berenang dan bermain air laut di pantai yang diperuntukan untuk anak-anak.

Pantai Mutun memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki keunikan karakteristik pantai yang berbeda terutama jika ditinjau dari jarak antara pantai dengan kota Bandar Lampung yang hanya 30 menit, kondisi perairan yang jernih, ombak yang tidak terlalu besar menjadi nilai implisit dan karakter tersendiri bagi wisatawan. Pengelolaan aspek pendukung kepariwisataan dengan baik, seperti sarana dan fasilitas pendukung yang ada disekitar kawasan pantai Mutun, dapat menciptakan peluang dalam peningkatan daya tarik, sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung kembali. Hal ini disebabkan karena pantai mempunyai kesan indah tersendiri yang mana orang takkan pernah puas untuk melihat dan menikmati keindahannya (Andriyani 2012).

Peran pemerintah dalam mengelolah pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur tidak hanya dalam bentuk fisik, memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun luar negeri, pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata, tidak hanya itu pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan wisata. Mengingat pentingnya peran dinas pariwisata dalam mengembangkan destinasi wisata pantai Mutun maka penulis mengangkat judul Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran Dalam Mengembangkan Pariwisata pantai Mutun di Pesawaran sebagai laporan tugas akhir ini.

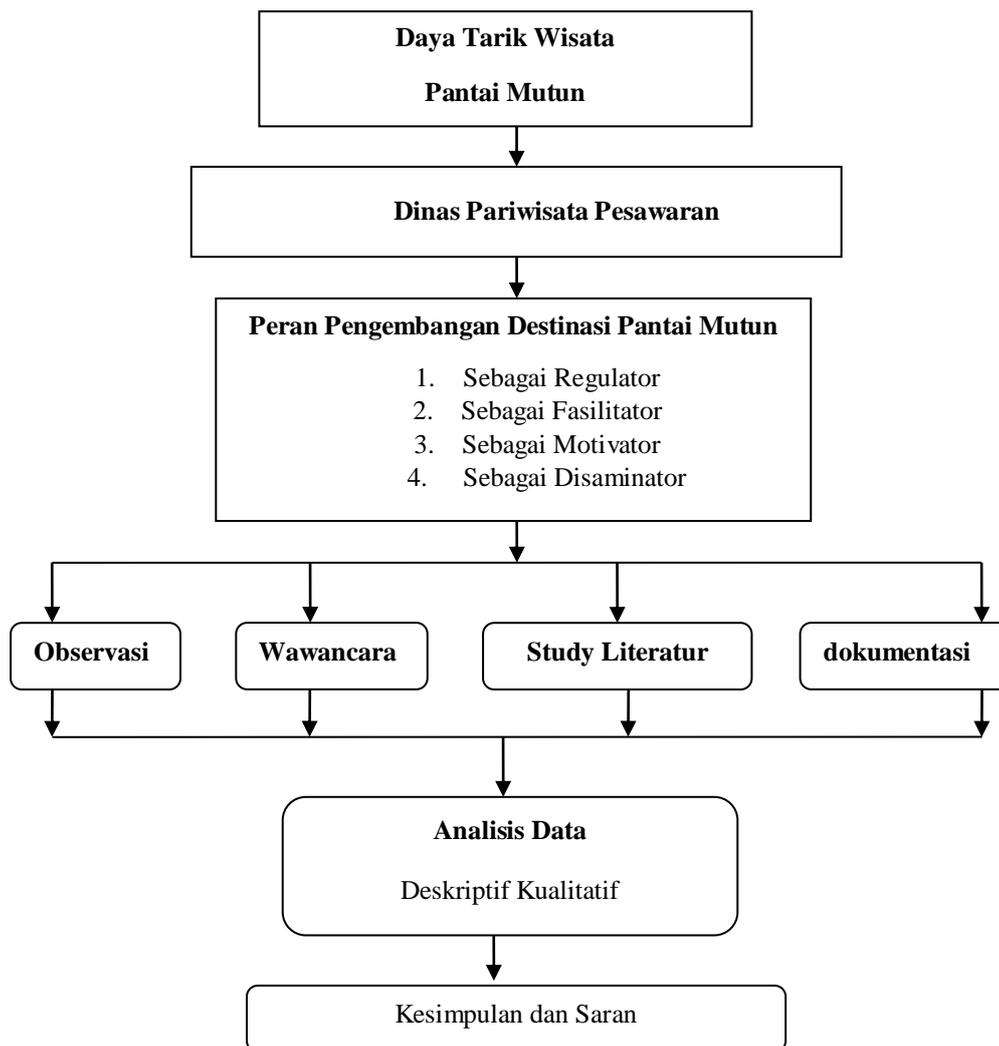
## **1.2 Tujuan**

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah :

Mendeskripsikan peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan pariwisata pantai Mutun di Pesawaran.

## **1.3 Kerangka Pemikiran**

Pantai Mutun merupakan salah satu destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Pesawaran. Pantai Mutun secara administratif masuk kedalam wilayah kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Desa Sukajaya Lempasing. Lokasi pantai ini tidak terlalu jauh dari pusat kota Bandar Lampung. Saat ini pantai Mutun menjadi salah satu daerah tujuan wisata bagi wisatawan yang ingin berwisata air, ataupun sekedar untuk menikmati suasana pantai. Potensi wisata yang menjadi daya tarik di pantai ini adalah pantainya yang bersih dengan pasirnya yang putih dan ombaknya yang tidak terlalu besar sehingga cocok untuk aktivitas berenang. Guna meningkatkan promosi dan kunjungan disuatu tempat wisata Dinas Pariwisata disini sangat berperan untuk memperoleh manfaat dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dalam garis besarnya yaitu menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparaturnya dan pihak swasta, pengaturan promosi umum dalam dan luar negeri. Kerangka pemikiran Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran Dalam Mengembangkan Pariwisata Pantai Mutun di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

#### 1.4 Kontribusi

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain:

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, laporan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dinas pariwisata supaya lebih mengoptimalkan kembali dalam memngebangkan wisata pantai Mutun.
2. Politeknik Negeri Lampung, laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan wisata pantai Mutun.
3. Pembaca, laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk lebih mengenal tentang wisata pantai Mutun.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Pariwisata

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri atas dua kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ketempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “tour”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata “Kepariwisataan” dapat digunakan kata “tourisme” atau “tourism” (Suwena 2017).

Pariwisata secara luas dapat diartikan sebagai aktivitas rekreasi yang dilakukan di luar rutinitas seseorang untuk melarikan diri dari kehidupan sehari-hari atau menemukan suasana yang berbeda. Pariwisata telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat di negara maju, dan menjadi bagian kecil dari masyarakat di negara berkembang.

Dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subyek wisata yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dan obyek wisata yang merupakan tujuan wisatawan. Sebagai dasar untuk mengkaji dan memahami berbagai istilah kepariwisataan, berpedoman pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan

setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

## **2.2 Konsep Peran Dinas Pariwisata**

Pengertian peran secara umum dapat diartikan sebagai perilaku individu terhadap pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status).

Menurut Riyadi (2002) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisisosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Di mana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Lantaeda, dkk (2017) mengemukakan bahwa hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sutarto (2009) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. Konsep siperan, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Menurut Iyas (2014) peran pemerintah daerah ada empat yaitu:

1. Sebagai regulator, peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
2. Sebagai dinamisator, pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnansi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembanguna daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam dinamika pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.
3. Sebagai fasilitator, Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.
4. Sebagai motivator, motivator yaitu fungsi pemerintah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.

- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan social tertentu.
- c. Peran berlangsung bila mana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Hal tersebut mempunyai implikasi penting dalam pembangunan fisik, selain fisik maka koordinasi dan manajemen organisasi dan pariwisata sangat diperlukan dalam terwujudnya pariwisata yang profesional dan dapat memberikan kepuasan terhadap wisatawan. Terkadang ada destinasi pariwisata yang sangat potensial, tetapi organisasi pariwisata tidak mampu mengelola dengan baik sehingga destinasi pariwisata tersebut akan kurang diminati oleh wisatawan.